

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan ekowisata di Desa Penanggal merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada pembangunan pariwisata berbasis potensi alam dan partisipasi masyarakat. Destinasi Tirtosari View dikembangkan sebagai objek wisata unggulan yang memanfaatkan keindahan alam sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola destinasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata di tingkat desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana utama kegiatan wisata.

Kerangka normatif pengelolaan ekowisata di Desa Penanggal telah ditetapkan melalui regulasi daerah yang memberikan legitimasi formal terhadap pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekowisata yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Landasan hukum ini sekaligus menempatkan Pokdarwis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pariwisata di tingkat desa yang bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan wisata secara profesional.

Implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Tirtosari View pada kenyataannya belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dalam dokumen kebijakan. Pokdarwis sebagai aktor utama pelaksana kebijakan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan operasional secara efektif. Kondisi tersebut terlihat pada rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi, penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan kegiatan yang sistematis.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia tersebut berimplikasi pada tingginya ketergantungan Pokdarwis terhadap pemerintah desa dalam menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan wisata. Ketergantungan ini menyebabkan tingkat kemandirian kelembagaan belum dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi pengelola wisata. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mandat kebijakan yang diberikan kepada Pokdarwis belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan yang memadai di tingkat desa.

Permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata juga terlihat pada aspek pengelolaan keuangan destinasi wisata. Mekanisme pembagian pendapatan wisata yang sebagian besar dialokasikan ke kas desa menyebabkan ruang gerak Pokdarwis dalam mengembangkan destinasi menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada terhambatnya upaya inovasi, peningkatan kapasitas anggota, serta pemeliharaan fasilitas wisata yang menjadi kebutuhan utama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Ketidakeimbangan antara tanggung jawab pengelolaan dan dukungan finansial yang tersedia menciptakan hambatan struktural dalam implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata. Pokdarwis dituntut menjalankan fungsi strategis sebagai pengelola destinasi wisata tanpa didukung sumber daya yang memadai untuk menunjang kinerja organisasi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah dan realitas implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Penanggal juga dipengaruhi oleh keterbatasan instrumen teknis yang bersifat operasional. Standar operasional prosedur, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pengelolaan destinasi belum tersedia secara komprehensif untuk mengatur mekanisme kerja dan koordinasi antaraktor. Ketiadaan perangkat teknis tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan tanpa pedoman yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Keterbatasan instrumen teknis berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip ekowisata dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa

Penanggal. Upaya pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta pemberdayaan masyarakat lokal belum terintegrasi secara sistematis dalam kegiatan operasional sehari-hari. Implementasi kebijakan cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang yang menjadi tujuan utama pengembangan ekowisata.

Dinamika implementasi kebijakan di tingkat operasional menunjukkan bahwa Pokdarwis menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan pariwisata. Kualitas pelayanan wisata masih belum konsisten karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang tersedia. Pemanfaatan media promosi digital juga belum dilakukan secara optimal, sementara koordinasi antar pemangku kepentingan masih memerlukan penguatan agar kegiatan pengelolaan wisata dapat berjalan lebih efektif (Hamdi et al., 2025).

Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan empiris antara kebijakan pengelolaan ekowisata yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah dan kapasitas aktor pelaksana dalam mengimplementasikannya di lapangan. Regulasi telah memberikan mandat yang jelas kepada Pokdarwis untuk mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Dukungan sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang belum memadai menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mampu mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan ekowisata di Desa Penanggal belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang memengaruhi efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Kondisi tersebut pada akhirnya menghambat terwujudnya ekowisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan secara lingkungan, serta partisipatif dalam melibatkan masyarakat lokal.

Realitas implementasi kebijakan yang demikian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai

faktor-faktor penyebab belum efektifnya pengelolaan ekowisata oleh Pokdarwis Tirtosari View. Penelitian terdahulu umumnya lebih menyoroti aspek pengembangan pariwisata secara umum tanpa menelaah secara spesifik proses implementasi kebijakan di tingkat aktor pelaksana. Kesenjangan kajian tersebut menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di tingkat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata secara empiris. Fokus kajian diarahkan pada peran Pokdarwis sebagai aktor pelaksana kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi dalam mengelola destinasi wisata. Hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realitas implementasi di tingkat desa sebagai dasar penguatan kebijakan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang ada di latar belakang, maka rumusan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata oleh Pokdarwis Tirtosari View di Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata oleh Pokdarwis Tirtosari View di Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan kajian mengenai implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pengelolaan ekowisata yang dilakukan di tingkat desa. Temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana suatu kebijakan dijalankan di

level lokal, khususnya ketika Pokdarwis berperan sebagai pelaksana utama dalam mengelola destinasi wisata.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di tingkat desa sebagai bagian dari kebijakan publik berbasis masyarakat. Kajian ini memperjelas adanya kesenjangan antara kebijakan normatif yang tertuang dalam peraturan desa dengan praktik pelaksanaannya oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dukungan fiskal, serta pola hubungan antar pemangku kepentingan lokal. Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat relevansi penerapan teori implementasi kebijakan yang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up dalam konteks pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, serta menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh peran dan kesiapan kelembagaan lokal dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi Pemerintah Desa Penanggal dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya memperbaiki implementasi pengelolaan ekowisata secara lebih efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut diarahkan pada penguatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tirtosari View melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyelarasan regulasi dengan kondisi empiris di lapangan, serta penyusunan instrumen teknis yang lebih aplikatif, seperti standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, dan rencana aksi pengelolaan destinasi wisata. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi Pokdarwis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan, serta mengembangkan strategi pengelolaan ekowisata yang partisipatif, sehingga mampu mendorong keterlibatan

masyarakat Desa Penanggal dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan konseptual bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan ekowisata di tingkat desa dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama pelaksana kebijakan. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan lintas wilayah dan konteks penelitian, khususnya dalam menilai efektivitas regulasi, kapasitas kelembagaan, serta dinamika hubungan antar pemangku kepentingan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat. Hasil kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya kerangka analisis dan pendekatan metodologis bagi studi lanjutan, terutama dalam upaya penguatan tata kelola dan kelembagaan lokal sebagai fondasi penting untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.